

(DARI BIRO TAPEM)

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, bahwa ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yaitu pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang tersebut diatas, urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh tahun 2012 meliputi 26 bidang urusan yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ACEH

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program dan kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- e. Penyediaan alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- i. Penyediaan makanan dan minuman.
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - k. Penyediaan Jasa Dukumen Kantor
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a. Pembangunan gedung kantor;
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c. Pengadaan mebeleur;
 - d. Pengadaan Komputer;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
 - h. Penunjang dan pembinaan kelembagaan.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Pendidikan dan pelatihan formal.
- 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
- a. Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah
 - b. Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing
 - c. Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba
 - d. Koordinasi Penanganan Konflik;
- 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
- a. Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia
 - b. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- 7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
- a. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
 - b. Pemantapan ideologi dan bela negara.
- 8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**
- a. Pembinaan aparaturnya perlindungan masyarakat
 - b. Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan
 - c. Penyelenggaraan gampong sadar hukum
 - d. Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik.
- 9. Program Pendidikan Politik Masyarakat**
- a. Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh
 - b. Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik
 - d. Penguatan kapasitas politik perempuan
 - e. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat
 - f. Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh
 - g. Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM

- h. Koordinasi dan pemantauan organisasi asing
- i. Penyusunan database parpol, ormas, lsm dan lembaga asing.

10. Program Pembauran Kebangsaan

- a. Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama
- b. Koordinasi pembauran kebangsaan

11. Program Pengembangan Data Informasi

Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik

12. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh

- a. Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh
- b. Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh
- c. Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian
- d. Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kantor khususnya untuk memenuhi kebutuhan biaya prangko, materai dan benda pos lainnya serta untuk pengiriman surat-surat dinas selama 1 (satu) tahun sebanyak buah. Untuk penyediaan materai 6000 saja dianggarkan sebanyak 349 buah dan materai 3000 sebanyak 208 buah. Jumlah anggaran yang disediakan Rp 21.330.000,- realisasi keuangan Rp 7.993.050,- (37,47%) dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 13.336.950,-
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kantor yaitu untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik selama 1 (satu) tahun. Jumlah anggaran Rp. 326.400.000,- realisasi Rp. 204.621.969,- atau 62,69 % dan sisa anggaran Rp. 121.778.031,-. Dan realisasi fisik 100%
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa administrasi keuangan yaitu penyediaan honorarium-honorarium bagi pengelola keuangan, Tim pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa yang jumlah anggaran Rp. 684.970.000,- realisasi Rp. 549.881.000,- (80,51%) dan sisa anggaran Rp. 135.089.000,- realisasi fisik 100%

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memelihara kebersihan lingkungan kantor yaitu untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta untuk pembayaran swakelola jasa petugas Kleaning Servis 5 (lima) orang selama 1 (satu) tahun. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 22.097.000,- realisasi Rp. 12.236.500,- (55,38 %) dan sisa anggaran Rp. 9.860.500,- realisasi fisik 100%
- e. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 87.466.465,- realisasi Rp. 83.466.465,- (95,69 %), sisa anggaran Rp. 4.229.965,- dan fisik 100%.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan cetak RKA dan DPA, laporan keuangan akhir tahun dan penggandaan/foto copy RKA dan DPA. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 55.310.000,- realisasi Rp. 45.037.600,- (81,48 %), sisa anggaran Rp. 10.242.700,- dan fisik 100%.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik serta perbaikan jaringan listrik/panel listrik kantor. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 33.841.000,- realisasi Rp. 33.395.250,- (98,68 %), sisa anggaran Rp. 445.750 dan fisik 100%.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Informasi melalui surat-surat kabar harian local dan surat kabar lainnya. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 35.220.000,- realisasi Rp. 28.233.000,- (80,16 %), sisa anggaran Rp. 6.982.000 dan fisik 100%.
- i. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan makan/minum tamu-tamu dan makan/minum Petugas Keamanan Kantor (SATPAM) jaga malam sebanyak 7 (tujuh) orang selama 1(satu) tahun. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 61.544.000,- realisasi Rp. 48.408.000,- (78,66%), sisa anggaran Rp. 13.136.000 dan fisik 100%.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan-undangan atau panggilan-panggilan baik mewakili Bapak Gubernur

maupun dari instansi terkait lainnya yaitu melakukan perjalanan dinas dalam maupun luar daerah. Jumlah dana yang Rp. 2.346.840.000,- realisasi Rp. 2.329.989.127,- (99,28%), sisa anggaran Rp. 16.850.875 dan fisik 100%.

k. Penyediaan Jasa Dukumen Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan spanduk publikasi dan biaya iklan baik media cetak maupun elektronik. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 186.300.000,- realisasi Rp. 40.061.280,- (21,50%), sisa anggaran Rp. 146.238.720 dan fisik 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan berupa bangunan gudang, selasar aula dan kanopi Mesjid, ukiran jepara dengan jumlah anggaran Rp. 389.175.000,- realisasi Rp. 362.198.600,- (93,07%) dan sisa anggaran Rp. 26.976.400 dan fisik 100%.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan peralatan kantor yaitu pengadaan mesin potong rumput, mesin hitung uang, mesin foto copy, alat pompa air, alat pendingin ruangan, lemari arsip, filleng cabinet, perlengkapan dapur, dispenser, jam dinding/meja, gorden ruangan kantor, kamera, soudnsystem, dan faximale dengan jumlah anggaran Rp. 480.797.250,- realisasi Rp. 463.737.100,- (96,45 %), sisa anggaran Rp. 17.060.150 dan fisik 100%.

c. Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana mobile kantor yaitu pengadaan meja kersi rapat, televise, mimbar mesjid, kursi kerja, papan persentasi, alat penghisap debu dan tanki air dengan jumlah anggaran Rp. 110.000.000,- realisasi Rp. 92.340.500,- (83,95%), sisa anggaran Rp. 17.659.500 dan fisik 100%.

d. Pengadaan Komputer

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan komputer yaitu pengadaan server, PC, Notebook, printer, scenner, monitor/display, ups, perlengkapn computer, proyektor, dengan jumlah anggaran Rp. 434.250.000,- realisasi Rp. 425.080.000,- (76,89%), sisa anggaran Rp. 9.170.000 dan fisik 100%.

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas serta pajak kendaraan dinas/operasional

kantor selama 1 (satu) tahun. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 344.152.000,- realisasi Rp. 236.325.440,- (68,67%), sisa anggaran Rp. 107.826.560 dan fisik 100%.

- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pemeliharaan/service peralatan kantor (computer, mesin foto copy, radio link, AC split, faximile dan mesin absensi) selama 1 (satu) tahun. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 178.950.000,- realisasi Rp. 139.838.100,- (78,14 %) dan sisa anggaran Rp. 39.119.900 dan fisik 100%.
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti rehap plafon kamar mandi, teras depan, ruang teras depan lantai satu, rehap teras lantai dua, rehap ruang teras lantai dua, dengan jumlah anggaran Rp. 1.127.220.886,- realisasi Rp. 1.122.765.000,- (99,60 %), sisa anggaran Rp. 4.455.886 dan fisik 100%.
- h. Penunjang dan pembinaan kelembagaan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk Rapat Kerja dengan para Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas atau sebutan lainnya Kab/Kota se-Aceh yang dilaksanakan di Banda Aceh. Tujuan dari Rapat Kerja ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur Kesbangpol dan Linmas dalam pelaksanaan Tupoksi. Jumlah dana yang dianggarkan Rp. 2.975.746.000,- realisasi Rp. 1.127.220,-(70,18%), sisa anggaran Rp. 887.471.330 dan fisik 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya.

Pengadaan 112 Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan jumlah anggaran Rp. 177.050.000,- realisasi Rp. 146.060.000,- (82,50%), sisa anggaran Rp. 30.990.000 dan fisik 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, kegiatan ini sifatnya bantuan kontribusi pelatihan teknis bagi Pegawai dengan jumlah anggaran Rp. 1.021.429.500,- realisasi Rp. 253.491.600,- (24,82%), sisa anggaran Rp. 767.937.900 dan fisik 100%.

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- a. Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah
Melalui kegiatan ini telah dilakukan dalam bentuk kajian terhadap Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah terkini yang disusun oleh Tim Pengkajian Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah dengan hasil yang dicapai :

- Tersedianya hasil kajian terhadap pengembangan keamanan
 - Tersedianya hasil kajian terhadap isu qanun lambaga dan bendera
 - Tersedianya hasil kajian terhadap perkembangan Pemilu 2014
 - Tersedianya hasil kajian terhadap penentasan kemiskinan
- Anggaran yang disediakan Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 84.800.000,- atau 84,80%.

b. Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi pemantauan keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing yang dilaksanakan di Provinsi sesuai dengan Permendagri No. 49 Tahun 2010 dan Permendagri No 50 Tahun 2010. Hasil yang dicapai adanya dokumen orang asing dan tenaga asing yang melakukan aktifitas di Aceh, baik sebagai tenaga kerja maupun wisatawan asing dan orang asing yang melakukan penelitian.

Anggaran yang disediakan Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 31.921.000,- atau 31,92%.

Realisasi kecil :

Kecilnya realisasi anggaran pada kegiatan ini tidak terlaksananya rapat-rapat rutin Tim Pemantau. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan lain yang harus diselesaikan dan kurang harmonisnya hubungan kerja antara Kabid dengan bawahannya. Dengan demikian ada beberapa mata anggaran yang tidak dapat dicairkan.

c. Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pelajar dan Aparatur Pemerintah di Kota Subulussalam. Hasil yang dicapai meningkatnya pemahaman dengan berbagi informasi antara sesama peserta dalam penanggulangan bahaya laten miras dan narkoba

Anggaran yang disediakan Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 92.916.000,- atau 92,92%.

d. Koordinasi Penanganan Konflik

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat rutin, Rakor dan Sosialisasi terhadap penanganan gangguan keamanan daerah dan penanganan konflik sosial seperti SARA dan lahan sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2013.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Meredamnya potensi konflik di masyarakat
- Terkendalinya gangguan keamanan di daerah
- Terlaksananya inpres No. 2 Tahun 2013
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap gangguan dan potensi timbulnya konflik sosial di masyarakat

Anggaran yang disediakan Rp. 450.000.000,- realisasi Rp. 278.574.800,- atau 61,91%

Realisasi kecil :

Kecilnya persentase serapan anggaran pada kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana, hal ini kurang harmonisnya Kabid dengan bawahannya. Dengan demikian ada beberapa mata anggaran yang tidak dapat dicairkan

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi ke Kabupaten/Kota dan bantuan hukum bagi masyarakat yang dilakukan pada korban konflik di 10 Kab/Kota.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah
 - Adanya peningkatan pemahaman terhadap HAM dan Hak-hak Bantuan Hukum bagi Masyarakat korban konflik
 - Bantuan hukum korban konflik diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari korban konflik dalam bentuk sosialisasi untuk memperoleh bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.Anggaran yang disediakan Rp 1.100.000.000,- dengan realisasinya Rp. 1.088.694.350,- atau 98,97%.
- b. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah
 - Adanya peningkatan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama
 - Adanya keharmonisan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
 - Tidak terjadi serta menghindari konflik antar umat beragamaAnggaran yang tersedia Rp 200.000.000,- dengan realisasinya Rp 197.840.000,- atau 98,82%.

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Telah dilaksanakan dalam bentuk Dialog kebangsaan, Dialog pemantapan ideologi kebangsaan dan bela Negara, Pemantapan Wasbang, Hak-hak Bantuan Hukum dan HAM bagi masyarakat dan pemeliharaan pemberdayaan masyarakat melalui dialog interaktif RRI Banda Aceh. Dialog tentang rancangan qanun Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemantapan Wasbang dan tentang Pemeliharaan Kerukunan Kehidupan Beragama melalui TVAceh.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah
 - Terjadi dialog antara narasumber dengan pemirsan TV dan pendengar RRI;
 - Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap hal tersebut diatas

Anggaran yang disediakan Rp 375.000.000,- dengan realisasinya Rp

374.030.200,-atau 99,74%.

- b. Pemantapan ideologi dan bela negara
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparatur Pemerintahan.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah
- Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap ideologi dan bela Negara;
 - Adanya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
- Anggaran yang di sediakan Rp 350.000.000,- dengan realisasinya Rp 349.870.400,- atau 99,96%.

8. Program Pemberdayaan Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

- a. Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dengan aparat kecamatan yang membidangi ketertiban umum, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP dan WH serta Badan Kesbangpol dan Linmas setempat yang bertujuan meningkatnya koordinasi dengan Provinsi dengan Kab/Kota dan lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya satuan Linmas di Kab/Kota.
Anggaran yang tersedia dalam DPA 2012 sebesar Rp 147.500.000,- sedangkan realisasi keuangan Rp 136.463.600,- atau 92,52%
- b. Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap perangkat gampong dan aparat keamanan di 7 Kab/Kota yang diikuti oleh Satuan Linmas Gampong, Geuchik, Imum dan Tuha Peut
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah
- Meningkatkan rasa tanggung jawab Satlinmas
 - Mewujudkan ketentraman dan keamanan dilingkungan masyarakat
- Anggaran yang di sediakan Rp 400.000.000,- dengan realisasinya Rp 361.048.400,- atau 90,26%
- c. Penyelenggaraan gampong sadar hukum.
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat/Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda/Perempuan sebanyak 60 orang di 10 Kab/Kota, Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah
- Terjadinya peningkatan pemahaman arti hukum dan perlakukannya ditengah-tengah masyarakat
 - Terciptanya gampong yang memiliki masyarakat sadar akan tatanan kehidupan bermasyarakat
- Anggaran yang di sediakan Rp 450.000.000,- dengan realisasinya Rp 431.939.500,- atau 95,99%.

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap kebijakan politik pemerintah Aceh terkait pengembangan politik daerah terkini dan pengembangan kondisi dan situasi daerah berupa lahirnya qanun-qanun Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjalannya Sinergisitas Kebijakan Politik Pemerintah Aceh dengan pemerintah Kab/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya khususnya dalam pemahaman terhadap lahirnya qanun – qanun Aceh

Anggaran yang di sediakan Rp 510.000.000,- dengan realisasinya Rp 455.554.075,- atau 89,32%

b. Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknik terhadap langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, kewajiban partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota parpol dan masyarakat, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, kewenangan parpol dalam hal terjadinya PAW DPRK dan upaya KIP Aceh dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Meningkatnya hak dan kewajiban Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Meningkatnya kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan;
- Maksimalnya fungsi parpol, baik fungsi terhadap masyarakat maupun terhadap serta mampu mengembangkan system politik yang demokrasi yang dilandasi etika dan budaya politik berazaskan pancasila

Anggaran yang di sediakan Rp 250.000.000,- dengan realisasinya Rp 239.051.550,- atau 95,62%

c. Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknik berkaitan dengan peran serta, hak dan kewajiban masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum, peran masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak politik, independensi dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dengan tidak memihak kepada salah satu partai peserta pemilu.

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Meningkatnya kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam rangka berpolitik
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik pada pemilu legislative 2014

Anggaran yang di sediakan Rp 250.000.000,- dengan realisasinya Rp 229,571,095,- atau 91.83%

- d. Penguatan kapasitas politik perempuan
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan partisipasi perempuan perempuan dalam mengisi kursi legislative pada pemilu 2014. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
- Meningkatnya partisipasi perempuan baik dalam kepengurusan parpol maupun keterwakili di lembaga legislative;
 - Meningkatnya kesadaran berpolitik, kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.

Anggaran yang di sediakan Rp 400.000.000,- dengan realisasinya Rp 394,321,000,- atau 98.58 %

- e. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan UU Ormas sesuai dengan UU 27 Tahun 2013 dimana fungsi ormas adalah sebagai sarana penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, sebagai penyalur aspirasi masyarakat sehingga terjadinya pemenuhan pelayanan sosial dalam memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- Adanya perkembangan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam bermasyarakat.
- Melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Paham lagu kebangsaan, tahu lambang kebangsaan)

Anggaran yang di sediakan Rp 250.000.000,- dengan realisasinya Rp 247,194,000,- atau 98.88 %

- f. Koordinasi pembauran kebangsaan
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat-rapat koordinasi dalam rangka mensikronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar kabupaten/kota dengan provinsi dalam rangka mencari solusi perencanaan pembangunan kebangsaan ke depan:

Anggaran yang di sediakan Rp 130.000.000,- dengan realisasinya Rp 129,995,300,- atau 99.99 %

10. Program Pengembangan Data dan Informasi

- a. Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Pengumpulan dan pengolahan data-data terkait konflik dan kekerasan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Tersedianya dokumen konflik
 - Tersedianya dokumen pemantauan kekerasan yang terjadi di Aceh bekerja sama dengan SNPK pusat
- Anggaran yang di sediakan Rp 48.000.000,- dengan realisasinya Rp 40.720.000,- atau 84,83%

11. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh

a. Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh dan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka survey dan laporan Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Terlaksananya kegiatan FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 4 Kabupaten
- Adanya dokumen hasil survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh

Anggaran yang di sediakan Rp 455.000.000,- dengan realisasinya Rp 300.344.804,- atau 66,01%

b. Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Seminar Capaian Penanganan Konflik Aceh berbasis data SNPK dan Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Memperkenalkan system nasional pemantauan kekerasan kepada Badan Kesbang se Aceh, SKPA, Ormas dan LSM
- Terlaksananya Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 2 Kabupaten dengan kesimpulan dan pemahaman terhadap penanganan konflik Aceh

Anggaran yang di sediakan Rp 455.000.000,- dengan realisasinya Rp 327.753.600,- atau 72,03%

c. Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Pembuatan / interior ruang display memorial perdamaian Aceh dan Pembuatan dan penggandaan film Memorial perdamaian Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Tersedianya ruangan Display Memorial Perdamain Aceh
- Tersedianya Film Dokumenter Memorial Perdamain Aceh berupa Master dan VCD

Anggaran yang di sediakan Rp 350.000.000,- dengan realisasinya Rp 260,707,700,- atau 74,49%

d. Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data mengenai program terkait penguatan perdamaian yang ada di Kab/Kota maupun di Provinsi Aceh, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan rekapitulasi mengenai program penguatan perdamaian Aceh

Anggaran yang di sediakan Rp 100.000.000,- dengan realisasinya Rp 85,360,000,- atau 85,62%

Total Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Belanja/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	(%)	Fisik (%)
Total Anggaran SKPA		28,475,359,250	24,381,787,370	85,62	95,76

C. Permasalahan, Solusi dan Prestasi/Kinerja

1. Permasalahan:

- a. Pada belanja tidak langsung adanya penganggaran Uang TPK untuk 7 (tujuh) orang Anggota Komisi Independent Pemilihan Aceh sebesar Rp. 724.822.687,- yang tidak dapat dilakukan pencairan, karena tidak ada Surat Keputusan Gubernur Aceh yang mengatur / memperuntukan sebagai dasar pembayaran.
- b. Kegiatan Penunjang Kelembagaan dengan jumlah anggaran dari APBA murni Rp. 1.324.686.000,- dan anggaran tambahan APBAP menjadi Rp. 2.975.746.000,- dengan tingkat realisasi Rp. 2.088.274.670,- sisa Rp. 887.471.330,-. Sisa terjadi karena kurangnya / lemahnya perencanaan dalam penganggaran pada pengajuan anggaran tambahan karena masih terdapat paket – paket pengadaan 42.290 lembar dan 40 lembar baliho. Sehingga pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan dalam waktu terhitung tanggal pengesahan APBAP sampai akhir tahun anggaran oleh pihak KIP
- c. Adanya penganggaran biaya sewa rumah untuk 7 (tujuh) orang anggota KIP sebesar Rp. 105.000.000,- dan dana ini tidak dapat dicairkan sampai akhir tahun anggaran karena tidak ada dasar hukum yang mengatur.
- d. Adanya kegiatan even simulasi penguatan dan perhitungan suara Pemilu di 7 Kabupaten / Kota yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak KIP karena keterbatasan waktu. Seharusnya hal ini tidak dianggarkan pada APBAP dan dianggarkan pada T.A 2013

2. Solusi :

Dari permasalahan diatas, untuk KIP sebaiknya proses pengadaan anggaran operasional diberikan dalam bentuk hibah. Karena untuk pencairan dana TPK, penunjang kelembagaan, sewa rumah untuk

komisioner dan kegiatan even simulasi harus melalui mekanisme dan UU yang mengatur terhadap keperluan KIP.

3. Prestasi/Kinerja

a. Realisasi anggaran

Pada tahun 2012, jumlah anggaran yang ada pada Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh berjumlah Rp. 12.816.974.571, dan realisasi Rp. 12.316.362.220.- terdapat peningkatan anggaran pada tahun 2013 sejumlah Rp. 16.158.997.030.- termasuk anggaran untuk KIP Rp. 8,5 milyar.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan mengacu kepada visi dan misi Gubernur Aceh yaitu Keberlanjutan Perdamaian. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah selesai dilakukan baik melalui sosialisasi, koordinasi, pendidikan politik, talkshow dan diskusi terhadap keberlanjutan perdamaian di Aceh.

b. Partisipasi Perempuan dalam Berpolitik

Peran serta perempuan dalam berpolitik telah menunjukkan angka yang signifikan, hal ini tercermin dalam keterwakilan perempuan yang duduk di DPRA maupun DPRK pada tahun 2009 -2014 berjumlah 51 orang, dari total jumlah anggota DPRA/DPRK 709 orang.

Untuk tahun 2014-2018 keikutsertaan perempuan sebagai calon anggota legislative naik menjadi Orang dari tahun sebelumnya Orang. Hal ini menandakan bahwa peran serta perempuan di dalam dunia politik sangat tinggi.

c. Toleransi Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kini berperan dalam menciptakan kerukunan masyarakat di dalam daerah. Peran FKUB dinilai sangat penting untuk mencegah konflik antarumat beragama maupun intra-agama. FKUB menjadi fasilitator dan membina masyarakat. FKUB perlu melakukan langkah preventif terhadap masalah. Kita berharap agar FKUB juga menyentuh sampai tingkat bawah. Pasalnya, meski sudah ada sejak 2006, masih banyak masyarakat yang belum mengerti tugas dan fungsi FKUB. Publik masih ada yang menganggap FKUB bentukan pemerintah. Konflik berlatar belakang agama di berbagai daerah bisa terjadi salah satunya lantaran kurangnya peran FKUB. Untuk meningkatkan kinerja FKUB kedepan Badan Kesbangpol dan

Linmas Aceh terus melakukan upaya pertemuan antarpemuka agama secara rutin untuk membahas masalah intoleransi di Aceh. Hingga tahun 2013, FKUB telah terbentuk di 23 Kabupaten/Kota, sehingga akan mempermudah dalam melakukan koordinasi terkait kerukunan umat beragama.

d. Kewaspadaan Dini Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah kita mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kedamaian Nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan itu semua, seluruh komponen masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat. Pada Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Pasal 11 secara teknis menyebutkan bahwa untuk memfasilitasi Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) dan komunikasi, informasi serta edukasi dalam rangka pencegahan dini pada masyarakat, dan memfasilitasi kewaspadaan masyarakat terhadap konflik pemerintahan dan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing berkoordinasi dengan instansi terkait dan bekerjasama dengan Intelijen Daerah.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, hingga tahun 2013 FKDM sudah terbentuk di 23 Kabupaten/Kota.

e.